

Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pelaku UMKM di Kota Palopo

Alvira Rahmayanti¹, A. M. Rusli² and Rahmatullah³

¹ Hasanuddin University, Tamalanrea, Makassar, Indonesia, 90245

² Hasanuddin University, Tamalanrea, Makassar, Indonesia, 90245

³ Hasanuddin University, Tamalanrea, Makassar, Indonesia, 90245

aldifitriayu22@gmail.com

Abstract. The Government's Role in Empowering UMKMs in Palopo City. UMKM activities cover almost all business fields so that the existence of UMKM is very important, especially for increasing income for low-income groups of people. This study aims to find out how the Government carries out its role as a facilitator, as a regulator, and as a catalyst on the 8 indicators mentioned in the Regional Regulations of the City of Palopo, especially in the development of UMKMs in the City of Palopo. The type of this research is qualitative research by explaining events that actually occurred in the field during this research. In this study there were 9 informants consisting of heads of cooperatives and SMEs, 1 head of the UMKM sector, 1 staff of the Cooperatives and UKM Office of Palopo City and several UMKM business actors. Data collection was carried out by direct field observations, interviews and documentation with informants. The results of this study indicate that the government's role in empowering UMKMs is carried out by the Office of Cooperatives and UKM and The City of Palopo in carrying out its role as a Facilitator, Regulator, and as a Catalyst has had a major influence in carrying out the empowerment given so that it can help UMKM actors to maintain and improve their business by providing access to financing and capital, promotion, coaching, mentoring training, and growing the business climate. by looking at the condition of UMKMs, especially micro-type businesses that have grown densely in various areas in Palopo City.

Keywords: Government Role, Local Government, Empowerment, SMEs, Development.

1 Pendahuluan

Pada negara berkembang salah satu yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan kegiatan negaranya adalah pembangunan nasional, begitu halnya dengan bangsa Indonesia. Salah satu hal yang diperhatikan dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah di bidang ekonomi. Pada era otonomi daerah saat ini, mewujudkan pembangunan nasional pada bidang ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah (Sukoco, 2019; Wartomo, 2022). Peranan UKM di Indonesia yang dikaitkan oleh pemerintah hendaknya harus dapat mengurangi tingkat pengangguran yang semakin bertambah dari tiap tahun, menanggulangi kemiskinan dengan membantu masyarakat yang kurang mampu dan pemerataan pendapat yang dapat

memperbaiki kehidupan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam keuangan khususnya (Basar, 2015).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau disingkat UMKM adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan merujuk pada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2008 yang diperbaharui pada UU No. 11 tahun 2020. Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan atau pun dihindarkan dari lingkungan masyarakat saat ini. Sebab keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal peningkatan pendapatan masyarakat (Hapsari & Kinseng, 2018).

Melihat kejadian Indonesia pada masa krisis, tidak berlebihan untuk fokus pada pengembangan UMKM swasta, dan sektor usaha ini sering diabaikan karena outputnya kecil dan tidak mampu bersaing dengan bisnis lain. Karakteristik umum UMKM adalah usaha yang mandiri, swasembada dana, wilayah pemasaran yang terlokalisir, aset perusahaan kecil, dan jumlah pegawai yang terbatas. Prinsip-prinsip pelaksanaan UMKM adalah kesatuan, ekonomi kerakyatan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, keberlanjutan, efisiensi peradilan dan kesatuan ekonomi nasional (Ansar et al., 2023)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo terus tumbuh secara pesat dan signifikan. Perkembangan UMKM menurut data BPS (2020) dapat dilihat pada table 1.1 dibawah ini:

Table 1. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Palopo Tahun 2020.

No.	Kecamatan	Unit	Tenaga Kerja		Modal
			Laki	Perempuan	
1	Wara	1.987	1.964	2.030	10.449.855.000
2	Wara Timur	484	339	450	8.201.211.110
3	Wara Utara	750	847	926	1.593.050.000
4	Wara Barat	341	116	154	1.655.060.000
5	Wara Selatan	160	116	110	1.184.500.000
6	Telluwanua	336	108	128	885.200.000
7	Bara	403	140	172	2.515.100.000
8	Sendana	135	76	82	298.500.000
9	Mungkajang	180	70	87	478.750.000
Total		4.776	7.965		27. 261.226.110

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palopo, 2020.

Data Tabel 1.1 tersebut, tercatat sebagai jumlah pelaku UMKM pada sembilan Kecamatan di Kota Palopo sangat signifikan. Dengan serapan tenaga kerja mencapai 7.965 orang. Menurut data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo, wilayah Kecamatan Wara Timur menjadi penyumbang terbesar ke tiga UMKM di Kota Palopo sekitar 10 persen dari jumlah unit UMKM yang ada. Selain letak geografis Kecamatan Wara Timur yang sangat strategis yaitu berada dipusat kota dengan lokasi keramaian yang mendukung, menjadikan Kecamatan Wara Timur menjadikan sektor sasaran pelaku UMKM khususnya di sektor usaha jajanan kuliner.

Sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik, kota palopo juga menjadi kota tujuan dari para pencari kerja yang berasal dari daerah sekitarnya sehingga menyebabkan lapangan kerja yang tersedia kota palopo tidak optimal dalam menyerap tenaga kerja yang ada yang pada akhirnya menimbulkan pengangguran di kota palopo. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran di kota palopo sebesar 9,67% mengalami peningkatan sebesar 0,71% menjadi 10,37% pada tahun 2020. Meningkatnya tingkat pengangguran di kota palopo menunjukkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja di kota palopo masih menjadi masalah yang harus menjadi perhatian pemerintah. Salah satu upaya dalam mengatasi masalah pengangguran di Kota Palopo adalah dengan meningkatkan peran masyarakat untuk terlibat dalam bidang usaha ekonomi kreatif.

Salah satu keseriusan pemerintah yang ditunjukkan dengan adanya berbagai macam program pemberdayaan melalui Usaha Kecil Menengah (UKM) yaitu usaha yang sinergi antara pemerintah dengan pihak-pihak lain sangat dibutuhkan untuk efektivitas program pemberdayaan (Desmintari et al., 2020; Nirwana et al., 2017; Shomedran et al., 2021). Dalam hal ini, UMKM adalah salah satu pendobrak perekonomian di Kota Palopo khususnya pedagang kecil untuk membantu perekonomian keluarga. Di samping itu keberadaan UKM merupakan salah satu faktor penting dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Palopo. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memaksa semua lini kegiatan masyarakat dilaksanakan di rumah, mulai dari sekolah, ibadah hingga bekerja untuk memperoleh penghasilan. Dikarenakan terbatasnya ruang gerak memaksa sektor usaha dan jasa mengurangi kegiatan produksi untuk mengurangi kerugian semakin besar, hingga pada akhirnya tidak sedikit pekerja yang dirumahkan bahkan diberhentikan dari pekerjaannya dan memicu peningkatan jumlah penduduk miskin di Tahun 2020. (BPS Kota Palopo, 2021).

Table 2. Jumlah Penduduk, Penduduk Miskin, dan Pengangguran Terbuka Tahun 2020.

Tahun	Penduduk Miskin (%)	Pengangguran Terbuka (%)	Penduduk (Jiwa)
2016	1.987	1.964	2.030
2017	484	339	450
2018	750	847	926
2019	341	116	154
2020	160	116	110

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palopo, 2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat penduduk miskin di Kota Palopo pada tahun 2016 8,74% dan jumlah pengangguran terbuka 14,54% dari 176.910 jiwa penduduk kota palopo, kemudian tahun 2017 penduduk miskin naik 0,04% jadi 8,78% dan jumlah pengangguran terbuka mengalami penurunan 3,58% menjadi 10,96% sedangkan jumlah penduduknya juga mengalami penurunan 172.920 jiwa, di tahun 2018 penduduk miskin mengalami penurunan 0,84% menjadi 7.94%, lalu jumlah pengangguran terbuka mengalami kenaikan 0,64% menjadi 11,60 dan jumlah penduduk juga naik jadi 180.680 jiwa, tahun 2019 penduduk miskin 7,82% turun 0,12% dari jumlah penduduk miskin tahun 2018, sedangkan jumlah pengangguran terbuka 10,32% turun 1,28% dari tahun 2018. Dan jumlah penduduk kota Palopo naik 184.600 jiwa, ditahun 2020 presentae penduduk miskin mengalami kenaikan 0,03% jadi 7.85%, dan jumlah pengangguran terbuka juga mengalami kenaikan 0,05 menjadi 10.37% ditahun 2020, disaat yang sama jumlah penduduk Kota Palopo sedikit mengalami kenaikan jadi 184.681 jiwa (Tadjuddin & Mayasari, 2019).

Mengingat banyaknya pengangguran dan tidak semua orang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi untuk memperoleh pekerjaan, maka keberadaan UKM di Kota Palopo ini memberikan peluang yang besar untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki pendidikan tinggi atau masyarakat kecil dan menengah. Namun, keberadaan dari UMKM ini bukan berarti tanpa masalah (Bayumi et al., 2022; Hartana, 2022; Indiworo, 2017). Menurut data yang dihimpun oleh Bidang Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo, permasalahan UKM berkaitan dengan permodalan, kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha yang ketat, kesulitan bahan baku, kurang teknis produksi keahlian, kurang keterampilan manajerial usaha dan kualitas sumber daya manusia pengelolanya (Falahi et al., 2023). Hal tersebut

dikarenakan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki UMKM yang dapat dilihat dari motivasi pribadi pelaku UMKM itu sendiri dalam melakukan kreatifitas untuk mengembangkan usaha mereka dan menemukan solusi dalam menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang ada saat ini. (Mayasari, 2019)

2 Metode

Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo, Jalan Andi Djemma Nomor 68 Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Penelitian ini dilakukan dengan estimasi waktu penelitian selama 3 (tiga) bulan. Tipe dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, serta mengungkapkan fenomena kejadian dan keadaan sesungguhnya dari pemberdayaan UMKM sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha yang ada di Kota Palopo.

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) data primer, merupakan jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari informan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada informan yang dianggap representative yang dapat memberikan informasi yang valid; dan (2) data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui sumber-sumber yang telah tersedia seperti catatan, laporan historis, serta dokumen-dokumen yang kemudian digunakan untuk melengkapi data primer sesuai dengan objek penelitian.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah narasumber atau informan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa komponen yang dianggap mengetahui atau terlibat langsung dalam proses pemberdayaan pelaku UMKM di Kota Palopo. Adapun informan penelitian ini yang dipilih secara purposive sampling adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo
2. Kepala Bidang Pemberdayaan UKM Kota Palopo
3. Pegawai Dinas Koperasi dan UKM
4. Pelaku UMKM

Untuk memperoleh data yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu (1) Observasi, teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap proses pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di Kota Palopo; (2) Wawancara (interview), adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung melakukan kegiatan tanya jawab dengan informan yang telah ditentukan; (3) Studi Kepustakaan (library research), teknik pengumpulan data dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen –dokumen, undang – undang, serta media informasi lain yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM; (5) Dokumentasi data online, teknik pengumpulan data ini seperti teknik studi kepustakaan, namun yang membedakan hanya media tempat dalam pengambilan data online menggunakan fasilitas internet.

Adapun teknik analisis data merupakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Data dari hasil wawancara dan kepustakaan yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah hasil catatan lapangan.

3 Hasil dan Pembahasan

3.1 Pelaksanaan Pemberdayaan Pelaku UMKM di Kota Palopo

Sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, dimana pada Pasal 14 yang berisi mengenai 8 indikator yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan Usaha Mikro. Adapun beberapa indikator untuk mengukur Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro yaitu sebagai berikut:

1. Permodalan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo bahwa berbagai cara atau tindakan telah dilakukan oleh pihak pemerintah dalam mengontrol dan meningkatkan kualitas UMKM di Kota Palopo salah satunya yaitu dengan melakukan pemberian bantuan modal usaha, dimana bantuan ini diharapkan mampu memberikan dorongan besar bagi pelaku usaha agar mampu bertahan dalam

persaingan ekonomi.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo, Program Pemberdayaan melalui bentuk fasilitasi permodalan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo memiliki banyak alokasi dan skema pembiayaannya. Di mulai dari menunjuk bank yang menyediakan dan menyalurkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang hanya mencakup pelaku usaha usaha mikro dan kecil. Serta penyaluran KUR dari perusahaan swasta seperti PNM (Permodalan Nasional Madani), Pegadaian yang khusus menyalurkan KUR kepada pelaku usaha Ultra Mikro (Umi) (Rosmeli, 2012; Sinuraya et al., 2018).

2. Promosi dan Pemasaran

Kegiatan promosi dan pemasaran sendiri biasanya dilakukan oleh dinas koperasi dan UKM dalam bentuk pameran perdagangan, dengan menyediakan dan memberikan ruang kepada UMKM untuk memasarkan produknya (Dyo, 2019; Hartana, 2022; lisa & Irham, 2022; Nahrudin, 2014). Beberapa UMKM juga telah diajarkan dalam melakukan penjualan online melalui pelatihan yang diadakan oleh dinas koperasi dan UKM sebelum di ikutsertakan dalam website pemasaran digital dan website lelang UMKM yang pola pemasarannya juga menggunakan pola lelang.

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Pegawai pada Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kota Palopo, mengatakan bahwa pemerintah daerah cukup rutin dalam melakukan fasilitasi pemasaran online baik itu melalui market place, kemitraan dengan koperasi, promosi dan pemasaran produk melalui kolaborasi dengan KPKNL Palopo, mengikutsertakan produk UKM di ajang pameran dan mengikutsertakan dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan. Selain itu, ada juga UMKM yang di fasilitasi oleh dinas koperasi dan UKM dalam menjualkan produknya di koperasi terbaik di Kota Palopo, dan memfasilitasi pemasaran online melalui kolaborasi dengan KPKNL Palopo, serta mengikutsertakan produk UKM diajang pameran baik dalam maupun luar kota.

3. Kemitraan

Dalam hal kemitraan sendiri, pemerintah daerah Kota Palopo khususnya Dinas Koperasi dan UMKM menghubungi beberapa Lembaga yang mempunyai kepedulian terhadap UMKM. Dari Lembaga tersebut kemudian diperbolehkan untuk membagi

ilmunya ataupun memberikan pelatihan langsung secara teknis.

Sama halnya yang di sampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Usaha Mikro yang mengatakan bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi yaitu dengan menghubungi para lembaga-lembaga tertentu yang memiliki kepedulian terhadap UMKM, kemudian dari lembaga tersebut diperbolehkan untuk membagi ilmunya ataupun memberikan pelatihan langsung secara teknis dengan tujuan agar para pelaku usaha nantinya mampu untuk bersaing secara mandiri dan semakin berkembang ditengah persaingan global.

4. Pendampingan Pengelola Usaha

Pendampingan adalah suatu pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, motivator, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan merupakan suatu proses yang memerlukan waktu dan tindakan nyata secara bertahap, berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat (Rofieq et al., 2018; Sudjoni et al., 2014). Oleh karena itu, dalam kegiatan pemberdayaan diperlukan pendampingan. pendampingan ini diperlukan sebagai agen pemberdayaan yang tugasnya tidak untuk menggurui, tetapi lebih tepatnya adalah sebagai fasilitator, komunikator, dan pembimbing masyarakat dilapangan.

Selain itu pemerintah setempat dalam hal ini diwakili oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo telah berusaha melaksanakan tugasnya sebaikmungkin dengan memberikan bantuan berupa pendampingan kepada seluruh pelaku usaha UMKM yang berkeinginan menerbitkan Nomor Induk Berusaha. Wawancara dengan salah satu pelaku usaha juga mengatakan dalam pengurusan NIB sendiri cukup terbilang mudah dan tanpa dipungut biaya dikarenakan hanya menyerahkan berkas dan dokumen melalui pihak RT sebagai salah satu syarat untuk membuat NIB.

5. Dukungan Kemudahan Memperoleh Bahan Baku dan Fasilitas Pendukung Dalam Proses Produksi

Dalam tahap ini, pemerintah Kota Palopo juga terus memasifkan pemberian bantuan dalam bentuk barang seperti alat usaha atau alat kerja guna menunjang proses produksi para pelaku usaha.

Sama halnya yang di sampaikan oleh pegawai dinas koperasi dan UKM Kota Palopo yang mengatakan jika setiap UMKM yang ingin memperoleh barang untuk proses produksinya, maka akan dimudahkan pengurusannya. Dimana usaha tersebut diharuskan terlebih dahulu untuk melakukan verifikasi dan apabila usaha tersebut terbilang layak maka akan diberikan validasi atau assessment terhadap usahanya. Akan tetapi dengan catatan menunggu terlebih dahulu anggaran setelah dilakukannya urusan prioritas pemerintah kota karena kegiatan tersebut termasuk didalam belanja tidak wajib. Kegiatan ini juga sempat di hentikan pada tahun 2020 ketika covid-19 karena anggaran diperuntukkan untuk hal-hal yang darurat saat itu.

6. Pelatihan

Pelatihan merupakan sarana yang dijalankan suatu perusahaan atau organisasi untuk membentuk SDM menghadapi era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Sehingga perusahaan/ organisasi harus merancang pelatihan yang terencana sehingga tetap eksis walaupun kompetisi di era globalisasi makin berat. Program pemberdayaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo dalam bidang pelatihan berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas serta kreativitas pelaku UMKM. Berikut disajikan data mengenai capaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM dari tahun 2019-2022

Table 3. Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo Tahun 2019-2022.

No.	Program/Kegiatan	Penanggungjawab	Jumlah	
			Target	Realisasi
2019	Program Penciptaan UMKM Kondusif	Diskop UKM	100%	99,75%
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM	Diskop UKM	100%	99,81%
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Diskop UKM	100%	100%
2020	Pengembangan Pendukung	Sistem Diskop UKM	90%	89%
2021	Pengembangan Pendukung Usaha Bagi UMKM	Sistem Diskop UKM	100%	96%

2022	Pemberdayaan UMKM	Diskop UKM	100%	99%
2022	Pengembangan UMKM	Diskop UKM	99%	98%

Sumber: Dinas UMKM Kota Palopo.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pemerintah setempat yang dalam hal ini di wakikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo, telah mencapai Sebagian besar dari realisasi program sesuai dengan yang ditargetkan walaupun tidak sempurna untuk memenuhi target yang telah di tetapkan. Hal ini karena jumlah UMKM di Kota Palopo yang terus meningkat.

7. Pameran Perdagangan

Terkait upaya pemerintah dalam memfasilitasi dalam kegiatan pameran perdagangan sendiri bisa dikatakan cukup memadai para pelaku usaha yang ingin merauk lebih pundi-pundi rupiah. Kegiatan pameran perdagangan terlaksana pada saat hari-hari penting salah satunya pada saat kegiatan hari jadi dan kegiatan yang dilaksanakan oeh perusahaan-perusahaan swasta.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mengatakan bahwa dalam pameran perdagangan pemerintah daerah memfasilitasi dengan memberikan informasi saja kepada pelaku usaha binaan dari dinas koperasi dan UKM untuk ikutserta menjualkan produknya dan kegiatan seperti inilah yang banyak di minati oleh pelaku usaha sehingga pemerintah juga terus berusaha sebisa mungkin agar semua UMKM dapat kesempatan untuk ikut dalam pameran perdagangan.

Selain memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha, pemerintah dalam hal ini dinas koperasi dan UKM juga sebagai pihak yang memfasilitasi itu cukup dimudahkan dalam melakukan pendataan secara langsung kepada UMKM yang usahanya belum memiliki legalitas sehingga bisa kami bantu untuk melakukan pengurusan agar usahanya lebih mudah untuk kami jangkau dalam mendapatkan bantuan-bantuan dari program yang akan dilaksanakan.

8. Perolehan Perizinan, Standarisasi, dan Sertifikasi

Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, begitu pentingnya “izin usaha” tersebut dalam konteks

berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala dinas koperasi dan UKM yang mengatakan bahwa dalam hal perolehan perizinan, pemerintah daerah memberikan secara gratis karena pemerintah ingin melindungi para pelaku usaha. Begitupun dengan pengurusan sertifikasi halal, HAKI dan BPOM (izin edar). Pemerintah ingin memberikan jaminan perlindungan dan kemudahan secara penuh kepada UMKM yang ada agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang dapat mendatangkan efek domino bagi pelaku UMKM karena akan menghambat laju usaha mereka sendiri, salah satunya saat ingin mengajukan modal. Sehingga sulit bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka menjadi lebih besar lagi.

Namun, masih banyak pelaku UMKM yang masih tidak peduli dengan aspek legalitas. padahal pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dimana PP tersebut telah mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

3.2 Pelaksanaan Pemberdayaan Pelaku UMKM di Kota Palopo

Fase Inisial. Proses pada tahap inisial adalah berasal dari pemerintah, oleh pemerintah, dan diperuntukkan bagi rakyat. Peran pemerintah pada tahap inisial sangat terasa, terutama dalam memberikan pelatihan, penyuluhan dan bantuan kepada para pengusaha. Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Koperasi, UMKM Kota Palopo yang bertanggung jawab dalam memberdayakan UMKM yang ada di Kota Palopo.

Adapun yang menjadi indikator dalam proses pemberdayaan pada tahapan ini, yaitu terdiri dari tiga indikator berikut ini:

a) Pelatihan

Sesuai dengan hasil penelitian, pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Palopo dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu pelatihan pemasaran yang berorientasi bagaimana masyarakat memasarkan produknya dengan baik melalui inovasi kemasan produk,

higienitas produk, dan pelatihan kewirausahaan. Selain itu, dalam rangka pengembangan kapasitas dan kualitas produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) maka tiap tahun dilakukan studi banding ke daerah-daerah dalam rangka memberikan pelatihan hak paten dan sertifikasi halal kepada masyarakat terhadap produk yang dihasilkan.

Namun demikian jenis pelatihan yang secara umum dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Palopo adalah meliputi pendidikan dan pelatihan (diklat), workshop, dan sosialisasi. Diklat merupakan proses transformasi ilmu dan pengetahuan kepada peserta dalam pengembangan usahanya tersebut. Diklat ini rutin dilaksanakan setiap tahun terutama kepada wirausaha pemula dan wirausaha baru.

b) Penyuluhan

Pelaksanaan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Palopo biasanya langsung disuatu tempat, seperti di kantor desa atau di kantor camat. Kemudian bentuk evaluasinya meliputi proses monitoring hasil daripada kegiatan penyuluhan tersebut. Evaluasi tersebut dalam bentuk laporan pertanggung jawaban akuntansi atau keuangan oleh peserta kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Palopo.

Selain pelatihan, juga ada penyuluhan yang berguna untuk menambah wawasan dari SDM terkait pengembangan UMKM. Penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo bekerja sama dengan Kantor Badan Pertanahan Negara Kota Palopo bertujuan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi usaha, dalam bentuk memberikan pensertifikatan tanah lintas sectoral bagi UMKM yang dimulai dengan melakukan pendaftaran tanah guna mencapai kepastian hukum dan mengurangi terjadinya sengketa tanah.

c) Kebijakan

Kebijakan pemerintah sangat berpengaruh dalam memberdayakan UMKM. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo dijadikan sebagai arah dan pedoman dalam pengembangan UMKM. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Fase Partisipatoris. Pada tahap partisipatoris, proses pemberdayaan pada dasarnya

dari pemerintah bersama rakyat dan diperuntukkan bagi rakyat. Fase ini baru bisa dilaksanakan ketika fase pertama telah menampakkan hasil yang sesuai dengan harapan. Adapun yang menjadi indikator dalam fase ini adalah

a) Keterlibatan Masyarakat dalam setiap Program

Pada tahap ini peran pemerintah semakin dikurangi dengan melibatkan masyarakat secara aktif guna menuju kemandirian. Ini bisa dilihat pada tingkat partisipasi masyarakat sebagai pelaku usaha yang cukup berminat pada setiap pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Palopo.

Sama halnya yang disampaikan oleh pelaku usaha pemilik restaurant yang mengatakan bahwa biasanya jika akan ada kegiatan pelatihan, dia akan di infokan melalui pesan whatsapp dan dia sudah pasti akan ikut, bahkan jika dia berhalangan untuk datang kegiatan pelatihan pun pasti dia akan menyuruh karyawannya untuk menggantikannya karena dia menganggap kegiatan seperti ini akan membantu dalam me-manage dan mengelola usaha yang ia jalankan saat ini.

b) Antusias masyarakat dalam program pemberdayaan

Tingkat antusiasme masyarakat dalam hal ini para pelaku usaha juga cukup tinggi dalam mengikuti pelatihan dan penyuluhan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Palopo. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada para pelaku usaha binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo yang rutin dalam mengikuti kegiatan pelatihan, penyuluhan maupun sosialisasi terkait program-program yang akan dilaksanakan.

Pelatihan yang dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Palopo berjalan efektif. Ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat pelaku usaha yang cukup tinggi dalam mengikuti pelatihan yang dilaksanakan. Selain itu, dalam menyelenggaraan pelatihan tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Palopo memberikan tunjangan biaya transportasi kepada peserta sehingga masyarakat cukup berpartisipasi dan begitu antusias.

Fase Emansipatoris. Pada tahap ini masyarakat telah berdaya dan mempunyai kemampuan dalam dirinya untuk mengembangkan UKM mereka sendiri. Oleh sebab itu

pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Kota Palopo harus disesuaikan dengan kondisi mereka. Untuk memberdayakan usaha-usaha ini perlu adanya dukungan, perlindungan dan pengembangan sepenuhnya dan seluas-luasnya dari dinas terkait. Kondisi dari usaha-usaha bidang perdagangan saat ini belum bisa secara menyeluruh menggunakan fase ini, karena kebanyakan dari usaha yang ada masih belum menemukan kemampuannya untuk memberdayakan usahanya sendiri dilihat dari banyaknya usaha yang sudah tidak aktif. Akan tetapi pada fase ini, terdapat beberapa usaha yang dapat dikategorikan sebagai usaha yang mampu berkembang secara Tangguh dan mandiri.

Hal tersebut sejalan yang terjadi juga di kota palopo dimana ada beberapa pelaku usaha yang memang telah mampu mengembangkan usaha mereka sendiri. Salah satunya pelaku usaha yang penulis wawancarai selaku founder dari usaha Tuuk Tea dimana pada awalnya hanya berjualan menggunakan gerobak keliling dan sekarang telah berkembang menjadi usaha yang lebih besar dan telah memiliki beberapa cabang. Dari fenomena diatas dapat kita lihat bagaimana perkembangan dari suatu usaha apabila seorang pelaku usaha ingin betul-betul memperhatikan setiap aspek yang menjadi daya Tarik dari suatu usaha yang dijalankan seperti kemasan logo produknya dan yang terpenting khususnya rasa dari produk tersebut.

Selain itu, dampak lain dari output fase emansipatoris ini adalah dapat membuka perluasan lapangan pekerjaan di Kota Palopo sehingga dari hal tersebut dapat menekan dan mengurangi angka pengangguran dan juga kemiskinan. Akan tetapi dalam proses menjadikan para pelaku usaha menjadi seorang pelaku usaha yang mandiri juga tidak menampik masih terdapat beberapa kendala didalamnya seperti masih sulitnya untuk mengubah pola pikir dan mindset pelaku usaha agar selalu ingin mengeksplor kemampuannya untuk mencoba hal-hal baru bagi usahanya.

4 Kesimpulan

Pelaksanaan dalam pemberdayaan UMKM di Kota Palopo sebagian besar telah terlaksana sebagaimana seharusnya. Namun tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Adapun indikator kesuksesan pelaksanaan peran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut berdasarkan hasil penelitian peneliti :

- a) Peran dalam memfasilitasi akses permodalan telah berjalan tetapi masih terdapat

kendala terkait pembiayaannya dimana masih banyaknya pelaku usaha yang pinjamannya masih ada tetapi usahanya sudah berhenti.

b) Peran dalam memfasilitasi promosi dan pemasaran sudah berjalan maksimal melalui berbagai program pelatihan.

c) Peran dalam memfasilitasi kemitraan juga telah berjalan dengan optimal sebagaimana pemerintah memberikan ruang bagi pelaku UMKM menjualkan produknya pada koperasi, marketplace dan perusahaan ritel.

d) Peran dalam pendampingan pengelolaan usaha belum berjalan secara maksimal karena pada proses pendataan pelaku usaha di setiap kecamatan belum merata sehingga masih banyak UMKM yang belum mengetahui keberadaan dari Dinas Koperasi dan UKM.

e) Peran dalam dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi telah berlangsung tetapi tidak maksimal dikarenakan keterbatasan pada anggaran yang dimiliki sehingga tidak bisa menjangkau para pelaku Usaha Kecil Menengah dalam jumlah banyak.

f) Peran dalam memfasilitasi pelatihan sudah sangat maksimal, dapat dilihat dari output yang didapatkan dari para pelaku usaha yang rutin ikut dalam setiap program pelatihan yang dicanangkan pemerintah.

g) Peran dalam memfasilitasi pameran perdagangan telah berjalan dengan optimal, dimana pemerintah selalu memberikan ruang kepada para pelaku UMKM untuk menjualkan produknya pada saat kegiatan-kegiatan penting di Kota Palopo.

h) Peran dalam memfasilitasi perolehan perizinan, standarisasi, dan sertifikasi telah terlaksana tetapi belum berjalan dengan maksimal karena dari total keseluruhan UMKM yang ada di Kota Palopo belum semua mempunyai NIB dan sertifikat halal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan UMKM Di kota Palopo yang di ukur melalui fase Inisial, Partisipatoris dan Emansipatoris adalah sebagai berikut:

a) Fase inisial, yang terdiri dari pelaksanaan pelatihan, penyuluhan dan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Palopo

terhadap pelaku UMKM, sudah cukup berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan pemberdayaan UKM seperti Pelatihan dan Penyuluhan bagi wirausaha pemula dan pembentukan wirausaha baru. Agar tidak bertentangan dengan tujuan Pemerintah itu sendiri maka Pemerintah mengeluarkan aturan atau kebijakan berupa fasilitasi bantuan modal, promosi, kemitraan, serta kelengkapan sarana dan prasarana.

b) Fase Partisipatoris, Keterlibatan masyarakat dalam setiap program serta antusias masyarakat dalam program pemberdayaan Usaha Kecil Menengah ini telah memberikan dampak nyata seperti, keaktifan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan. Dimana output yang dihasilkan yaitu pelaku UMKM dapat saling mendukung dan saling memberi pendapat satu sama lain dan juga dapat menemukan solusi dari setiap kendala yang menghambat perkembangan program pemberdayaan tersebut.

c) Fase Emansipatoris, pada tahap ini masyarakat telah berdaya dan mempunyai kemampuan dalam mengembangkan usahanya, namun dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan Usaha Kecil Menengah ini masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia serta terbatasnya anggaran yang dimiliki sehingga tidak bisa menjangkau para pelaku Usaha Kecil Menengah dalam jumlah banyak.

References

- Ansar, M. C., Tsusaka, T. W., Nitivattananon, V., & Rusli, A. M. (2023). *Social Sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises: The Case of Makassar City, Indonesia*.
- Basar, A. M. A. (2015). Peranan Usaha Kecil Menengah (Ukm) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. *Skripsi Dipublikasikan. Kuningan*.
- Bayumi, M. R., Jaya, R. A., & Shalihah, B. M. (2022). Kontribusi Peran Perempuan dalam Membangun Perekonomian sebagai Penguatan Kesetaraan Gender di Indonesia. *Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.24042/jwcs.v2i2.14317>
- Desmintari, D., Aryani, L., & Pusporini, P. (2020). MEMBANGUN PEMAHAMAN KEWIRAUSAHAAN DAN PENGETAHUAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA BAGI PELAKU UKM CILODONG BERKARYA DI DEPOK. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 3(1). <https://doi.org/10.24912/jbmi.v3i1.8001>
- Dyo, B. Z. (2019). Penerapan Collaborative Governance Pada Promosi Produk UMKMTenun Balai Panjang di Kota Payakumbuh. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 91–108. <https://doi.org/10.25077/jakp.3.1.91-108.2017>
- Falahi, A. F., Hutasuhut, J., Syamsuri, A. R., Lubis, T., Harahap, N., & Abdullah, F. (2023). Peningkatan Kemampuan Manajemen bagi Pelaku UMK di Desa Tanjung Rejo Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal SOLMA*, 12(2). <https://doi.org/10.22236/solma.v12i2.12344>
- Hapsari, A., & Kinseng, R. A. (2018). Hubungan Partisipasi dalam Program Pemberdayaan UMKM dengan Tingkat Kesejahteraan Peserta. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.1.1-12>
- Hartana. (2022). PENGEMBANGAN USAHA UMKM DI MASA PANDEMI MELALUI OPTIMALISASI DIGITAL MARKETING DI KABUPATEN BULELENG. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 1–24. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.50585>

- Indiwo, H. E. (2017). PERAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA UMKM. *EQUILIBRIA PENDIDIKAN : Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, 1(1), 40–58. <https://doi.org/10.26877/ep.v1i1.1806>
- lisa, S. N., & Irham, M. (2022). STRATEGI DINAS KOPERASI DALAM MENGEMBANGKAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN LANGKAT. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 109–114. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.2432>
- Nahrudin, Z. (2014). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN DI KELURAHAN SUMPANG BINANGAE KABUPATEN BARRU. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1). <https://doi.org/10.26618/ojip.v4i1.83>
- Nirwana, D. C., Muhammadiyah, M., & Hasanuddin, M. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.26618/kjap.v3i1.890>
- Rofieq, M. R., Permatasari, D. P., & Farida, L. F. (2018). MODEL PENDAMPINGAN UMKM BIDANG KERAJINAN MENJADI START-UP SUKSES DI KOTA MALANG. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 3(2). <https://doi.org/10.26905/abdimas.v3i2.2585>
- Rosmeli, R. (2012). ANALISIS PROGRAM BANTUAN MODAL KREDIT USAHA PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT (KUPEM) OLEH PEMERINTAH KOTA JAMBI TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA JAMBI. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 1(3), 239–244. <https://doi.org/10.22437/jmk.v1i3.1841>
- Shomedran, S., Waty, E. R. K., Husin, A., & Andriani, D. S. (2021). Penyuluhan Kewirausahaan Sosial dan Penguatan Kelompok UMKM Dalam Upaya Peningkatan Pemasaran Masa Pandemi Covid-19 di Desa Burai Ogan Ilir. *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 225–231. <https://doi.org/10.24036/abdi.v3i2.203>
- Sinuraya, S. I., Darwin, M., Keban, Y. T., & Sukamdi, S. (2018). DIPERLUKAN PENDEKATAN KEBIJAKAN ADAPTIF UNTUK PENGUATAN MODAL UMKM DI KABUPATEN SLEMAN. *Jurnal Kawistara*, 8(2), 137–147. <https://doi.org/10.22146/kawistara.33344>
- Sudjoni, M. N., Hindarti, S., BS, K. A., & M, M. M. M. (2014). MENUMBUH KEMBANGKAN POTENSI BATIK MELALUI PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN (P3). *AGROMIX*, 5(2). <https://doi.org/10.35891/agx.v5i2.720>
- Sukoco, J. B. (2019). Kapasitas Kelembagaan Dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Surakarta. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(1), 15–22. <https://doi.org/10.14710/jab.v8i1.21215>
- Tadjuddin, T., & Mayasari, N. (2019). Strategi pengembangan umkm berbasis ekonomi kreatif di kota palopo. *Dinamis: Journal of Islamic Management and Bussiness*, 2(1).
- Wartomo, W. (2022). MENUMBUHKAN KESADARAN DALAM MANAJEMEN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF PADA SEKTOR USAHA KECIL MENENGAH (UKM). *Jurnal Guru Kita PGSD*, 6(4), 638–650. <https://doi.org/10.24114/jgk.v6i4.43962>